

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor publik di Indonesia saat ini sangat ditentukan oleh tuntutan akuntabilitas lembaga publik yang semakin meningkat. Lembaga publik tersebut antara lain pemerintahan pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan (Nihayah 2015). Penelitian ini menggambarkan tentang sebuah objek Pemerintah Kabupaten Ponorogo dimana ruang lingkup memiliki luas 1.371,78 km² dengan tata letak 111^o 17' - 111^o 52' Bujur Timur dan 7^o 49' - 8^o 20' Lintang Selatan pada ketinggian mencapai 92 sampai dengan 2563 Mdpl. Bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Magetan. Sebelah timur Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, bagian selatan Kabupaten Pacitan, bagian barat Kabupaten Pacitan dan Wonogiri Jawa Tengah. Keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo di bagi menjadi 2 sub area, yaitu area daratan tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko dan Pulung serta Kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah (www.ponorogo.go.id, Diakses tanggal 9 Desember 2021). Penelitian ini memilih wilayah Kabupaten Ponorogo sebagai objek penelitian karena mempunyai ruang lingkup yang luas, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan membutuhkan waktu yang lama.

Organisasi sektor publik yang direspon oleh karyawan tersebut, baik atau buruk salah satunya mengandalkan pemerintah untuk mengelola laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas laporan keuangan. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terdiri atas 7 (tujuh), yaitu: neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa factor . Ketepatanwaktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Tepat waktu bila informasi yang disajikan tersebut bertepatan pada waktu informasi dibutuhkan, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi tidak relevan lagi ketika tidak tepat waktu, dimana informasi harus tersedia bagi pihak yang berkepentingan sebelum informasi tersebut kehilangan relevansinya dalam mempengaruhi keputusan (Saputra dan Ariani 2018).

Dalam ketentuan yang mengatur mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam sektor pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala bagian keuangan harus telah menyerahkan laporan keuangannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk selanjutnya diaudit, hal tersebut tertera dalam UU Nomor 1 Tahun 2004. Menurut Saputra dan Ariani (2018) salah satu penyebab

keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada publik adalah karena kepala terlambat dalam menyerahkan laporan keuangannya pada BPK sehingga pemeriksaan atas LKPD tersebut terlambat untuk diselesaikan dan berdampak pada tertundanya penyerahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketepatan waktu penyampaian laporan pembiayaan terkait dengan Kabupaten Ponorogo menjadi isu penting karena informasi laporan keuangan harus disampaikan tepatwaktu agar keputusan-keputusan ekonomi dapat segera diambil dan untuk menghindari hilangnya relevansi informasi yang terdapat didalamnya. Ada bukti bahwa tidak semua daerah bisa menyerahkan laporan keuangan tepat waktu. Menurut kepala BPPKAD Kabupaten Ponorogo, penghargaan yang merupakan lanjutan dari opini WTP ini menunjukkan bahwa pemerintah Ponorogo secara finansial terkendali dan dilaporkan dengan baik. Pendapat dan penghargaan ini berarti Kabupaten Ponorogo dapat melakukan aktivitas pengelolaan keuangan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku (www.ponorogo.go.id, Diakses tanggal 9 Desember 2021). Kabupaten Ponorogo sudah 9 kali berturut-turut mendapat opini WTP yang diberikan oleh BPK tetapi menurut Kasubag Akuntansi Pendapatan & Pembiayaan BPPKAD menyatakan bahwa saat penyusunan laporan keuangan masih menemukan masalah atau kendala terkait dengan kompleksitas dalam volume tugas yang harus dikonsolidasikan oleh BPPKAD karena mengingat beberapa transaksi dikerjakan secara manual sehingga menyita waktu yang lama.

Keuangan Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah wajib melaksanakan pengendalian anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pengawasan keuangan daerah adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah (Anshori, 2018). Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dapat dicapai melalui proses pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan benar-benar dilaporkan dan bertanggung jawab pada masyarakat dan DPRD untuk bahan penilaian. Pemerintah daerah tidak hanya berhak mengetahui tentang pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga berhak mempertanggungjawabkan penerapan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Anshori, 2018). Penelitian terdahulu perihal pada pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan (Anshori, 2018) mengemukakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif pada ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam SKPD Kabupaten Bantul. Dan sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Trisaputra, 2013) menyatakan bahwa

pengawasan keuangan daerah yang pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kewajiban organisasi sebagai tindakan psikologis yang dibentuk oleh karakteristik kesediaan untuk menerima dan bekerja sama dengan tujuan dan nilai organisasi keinginan yang kuat untuk tetap jujur dengan organisasi seorang anggota organisasi. Karyawan dengan komitmen organisasi bekerja secara maksimal komitmen karena mereka yakin akan mencapai tujuan perusahaan penting (Anshori, 2018). Tegakkan kepatuhan hukum Hal ini diikuti dengan komitmen organisasi yang kuat. Seorang reporter keuangan dengan tingkat komitmen organisasi yang tinggi meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan (Maharani dan Agustin, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Hermayanthi, Purnamawati dan Julianto (2017) serta Maharani, Agustin (2021) bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Dan sebaliknya dalam komitmen organisasi yang diteliti oleh (Delima, 2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Saputra dan Ariani (2018) menyatakan, kompleksitas adalah suatu kondisi dari berbagai faktor yang mempengaruhi suatu organisasi baik dari lingkungan *internal* maupun eksternal. Kompleksitas diukur dengan jumlah populasi. Populasi menyebabkan pelaporan keuangan pemerintah kurang tepat waktu. Populasi penduduk yang besar akan berdampak pada peningkatan penyediaan layanan publik, dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk mengungkapkan segala sesuatu informasi mengenai

daerahnya kepada masyarakat sehingga waktu yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan menjadi lebih panjang (Saputra dan Ariani, 2018). Hasil penelitian Saputra dan Ariani (2018) bahwa kompleksitas berpengaruh terhadap terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Dan sebaliknya dalam kompleksitas yang diteliti oleh (Putri dan Suryono, 2015) menyatakan bahwa kompleksitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Selain kompleksitas ada hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu sistem pengendalian *intern*. Sistem pengendalian *intern* merupakan hal ketiga yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pemerintah desa (Marlinawati dan Wardani, 2018). Sistem pengendalian *intern* merupakan sistem pengendalian yang harus diterapkan dalam lingkungan pemerintahan untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Dengan adanya sistem pengendalian *intern* yang baik diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi sehingga proses akuntansi dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat serta dapat meyakinkan masyarakat desa tentang keakuratan, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah desa (Marlinawati dan Wardani, 2018). Temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Marlinawati dan Wardani (2018) bahwa sistem pengendalian *intern* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Dan sebaliknya dalam pengendalian *intern* yang diteliti oleh (Sukaesih, 2017) menyatakan bahwa pengendalian *intern* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan pada penelitian terdahulu melibatkan sebuah organisasi sektor publik atau pemerintah. Dimana peneliti melakukan penelitian dengan meneliti dampak-dampak yang terkait untuk mendorong sebuah ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dimana penelitian ini ditujukan pada organisasi sektor publik yaitu sebuah SKPD Kabupaten Ponorogo dengan sasaran untuk mendapatkan bukti-bukti atau aspek-aspek yang berpengaruh positif terkait ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yaitu SKPD Kabupaten Ponorogo dan variabel yang dipilih dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari beberapa penelitian terdahulu, selain itu variabel yang dipilih merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga peneliti termotivasi untuk meneliti pengawasan keuangan daerah, komitmen organisasi, kompleksitas dan pengendalian *intern* terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini menggunakan analisis linear berganda untuk dua variabel atau lebih, menurut Santoso (2015) analisis regresi linear berganda dipakai penelitian untuk mengerti pengaruh atau dampak lebih dari satu variabel independen.

Deskripsi dan fakta diatas tentang penelitian ini yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini dengan judul **Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Kompleksitas Dan Pengendalian *Intern* Terhadap Ketepatanwaktuan**

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Ponorogo).

1.2 Perumusan Masalah

Ringkasan masalah penelitian ini seperti uraian latar belakang diatas, bahwa mempunyai beberapa faktor tentang ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Ponorogo ?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah kompleksitas berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Ponorogo ?
4. Apakah pengendalian *intern* berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Ponorogo?
5. Apakah pengawasan keuangan daerah, komitmen organisasi, kompleksitas dan pengendalian *intern* berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Ponorogo ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki sebuah tujuan yang dimana memperlihatkan sebuah penelitian yang diuji secara benar dari sebuah penelitian atau pendalaman yang sudah ada, serta untuk menguraikan penelitian yang ada. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Ponorogo.
- b. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Ponorogo.
- c. Mengetahui pengaruh kompleksitas terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Ponorogo.
- d. Mengetahui pengaruh pengendalian *intern* terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Ponorogo.
- e. Mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah, komitmen organisasi, kompleksitas dan pengendalian *intern* terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah terhadap SKPD Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mempunyai sebuah pengertian yaitu sebuah kegunaan atau daya yang digunakan untuk pihak-pihak yang bersangkutan berupa sebuah evaluasi yang diberi oleh peneliti setelah penelitiannya selesai. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan tambahan untuk literatur atau referensi dalam melakukan penelitian kedepannya pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai informasi mengenai “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Kompleksitas Dan Pengendalian *Intern* Terhadap Ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Pemerintah Daerah Ponorogo”

b. Bagi Pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pihak-pihak yang bersangkutan terutama di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana pada SKPD tersebut mampu mengevaluasi para pegawainya pada sebuah penyusunan laporan keuangan agar dapat disajikan tepat waktu. Sehingga pada SKPD tersebut mampu menciptakan pelaporan keuangan daerah secara efektif dan efisien.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai penghubung pada sebuah sarana menambah wawasan, pengetahuan, dan berbagai ilmu yang telah dipelajari.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah referensi atau literatur dimasa yang akan datang dimana sebuah peneliti menjadikan tema penelitian yang sama dan menjadikan sebuah gambaran atau acuan dalam penelitian kedepannya.

